

LAMPIRAN III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : PESISIR SELATAN  
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program - Anggaran Rp. 8.589.169.788,- - Realisasi Rp. 8.492.979,-	4 Program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila ada, sebutkan ada sebanyak 4 yg terdiri dari: 1. SOP ttg perekaman KTP 2. SOP ttg penerbitan KK 3. SOP ttg penerbitan Akta Kelahiran 4. SOP ttg penerapan NIK Nasional	Ada 4 (empat) SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Pebup No. 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan	1 buah
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 14 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16 jabatan	88%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat Daerah, sebanyak 38 personil - Total PNS kabupaten, sebanyak 6.801 Personil	0.01
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 14 orang	36%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah	- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 14 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang	88%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Kelengkapan dokumen	9	Keberadaan dokumen	Ada atau tidak ada dokumen	sebanyak 4 jenis	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
		perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah		perencanaan pembangunan Daerah di Perangkat Daerah 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	ada
		Sinkronisasi program RENJA dengan program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen	- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program	ada
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang dikomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 Program - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program	100%
6	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.589.169.788.- - Total belanja Perangkat Daerah Rp.1.846.923.981.831,39	46.51%
		Besaran belanja modal (Realisasi)	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD X 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.8.492.449.979,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.693.640.789.061,71	50.14%
		Besaran belanja pemeliharaan (Realisasi)	15	Total Belanja Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dai Total Belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Lanbgsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.5.028.093.510,- - Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.8.492.449.979,-	59.21%
			16	Total Belanja Tidak langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi Total belanja perangkat daerah	- Realisasi Belanja Tidak langsung Perangkat Daeah, Sebesar Rp.3.499.368.038,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.8.492.449.977,-	41.21%
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan Laporan Keuangan	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, CALK)	Apabila Ada, Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 jenis sbb : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK	Manajemen aset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada, yaitu Kartu Inventaris barang (KIB)	Ada

1.362706

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Penggunaan aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total aset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sbanyak Rp.5.791.259.139,-	0,00%
		Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di media massa	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan pengumuman 2. Papan Layanan Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Media masa cetak (koran) 6. Website daerah	Jumlah sebanyak 6 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Ada

Painan, 26 Februari 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESIR SELATAN



EVANAUZA YULIASMAN, SE, M.SI  
N P 19670712 199202 1 001

**DATA APARATUR SIPIL NEGARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PER 31 DESEMBER 2019**

NO	NAMA/NIP	NAMA JABATAN	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)								JENIS KELAMIN	GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL (DIKLAT PIM)			
					SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	I		II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP.19670712 199202 1 001	Kepala Dinas	V		-	-	-	-	-	-	V	L	-	-	-	V	-	-	V	-	
2	EDI SISWADI, SE, MM NIP.19660306 199403 1 004	Kabid. Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	V		-	-	-	-	-	-	V	L	-	-	-	V	-	-	-	V	
3	TASRIAL, SH NIP.19631019 198503 1 009	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	V		-	-	-	-	-	V	-	L	-	-	V	-	-	-	-	V	
4	SARTONI NURSALIM, S.Kom NIP.19760519 200604 1 003	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan &	V		-	-	-	-	-	V	-	L	-	-	V	-	-	-	-	V	
5	KHAIRAT, SH,Msi NIP.19691202 199003 2 002	Kasi Kelahiran dan Kematian	V		-	-	-	-	-	-	V	P	-	-	-	V	-	-	-	V	
6	ROSMANIAR,SH NIP. 19611213 199110 2 001	Kasi Pengesahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	V		-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	V	-	-	-	-	V	
7	SYAFNIATI,SH NIP. 19650314 198511 2 001	Kasi Pindah Datang Penduduk	V							V		P			V						
8	SUSMITA PERMANA, SH. MS.i NIP.19801219 199903 2 001	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	V		-	-	-	-	-	-	V	P	-	-	V	-	-	-	-	V	
9	HARMAH DONNA, SE NIP.19800103 200902 2 005	Kasubag Umum dan Kepegawaian	V		-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	V	-	-	-	-	-	
10	HAYATUL FITRI, S.Kom NIP.19741022 200604 2 010	Kasi. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	V		-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	V	-	-	-	-	V	
11	ANTON MAHENDRA AMRA, SH. MM NIP. 19790919 200501 1 008	Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	V		-	-	-	-	-	-	V	L	-	-	V	-	-	-	-	V	
12	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	Kepala Seksi Identitas Penduduk	V		-	-	-	-	-	V	-	L	-	-	V	-	-	-	-	V	
13	YUSMARDIANTO, SH. MM NIP. 19811126 200701 1 003	Kasi. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	V		-	-	-	-	-	-	V	L	-	-	V	-	-	-	-	-	
14	FIO DENCI FAKHRYA, SH NIP.19840723 200701 2 001	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	V		-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	V	-	-	-	-	-	
15	IFO NIRA SISKA NIP.19851012 200501 2 001	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan		V	-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	V	-	-	-	-	-	
16	DEVI MUFIANI TAUFIK , S.Sos NIP.19761212 200801 2 013	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		V	-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	V	-	-	-	-	-	
17	GANEZA RIVALDO NIP.19860106 200801 1 003	Staf		V	-	-	-	-	-	V	-	L	-	-	V	-	-	-	-	-	
18	YOEDIANTO NIP.19830615 200701 1 001	Staf		V	-	-	-	-	-	V	-	L	-	-	V	-	-	-	-	-	
19	YENDRA BHAKTI, A.Md NIP.19700731 201407 1 001	Staf		V	-	-	-	-	V	-	-	L	-	V	-	-	-	-	-	-	
20	INDRA PUTRA NIP. 19750310 200604 1 014	Staf		V	-	V	-	-	-	-	-	L	-	V	-	-	-	-	-	-	
21	DEWI SUSANTI NIP.19810908 200701 2 004	Staf		V	-	V	-	-	-	-	-	P	-	V	-	-	-	-	-	-	

NO	NAMA/NIP	NAMA JABATAN	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)							JENIS KELAMIN	GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL (DIKLAT PIM)			
					SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	WIWIT TUTI HALIMAH NIP.19851223 201001 2 026	Staf		V	-	V	-	-	-	-	-	P	-	V	-	-	-	-	-	-
23	HENGKI PRATAMA PUTRA NIP. 19851219 201407 1 003	Staf		V	-	V	-	-	-	-	-	L	-	V	-	-	-	-	-	-
24	SRIYANTINI, SH NIP. 19650504 198803 2 003	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	-	V	-	-	-	-
25	Drs. ISKANDAR NIP. 19650206 200701 1 004	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	-	V	-	L	-	-	V	-	-	-	-	-
26	ZULKAMBRI, SH NIP. 19720820 200701 1 010	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	-	V	-	L	-	-	V	-	-	-	-	-
27	KASRIL NIP. 19641231 198603 1 133	Fungsional Umum		V	-	V	-	-	-	-	-	L	-	-	V	-	-	-	-	-
28	DARMAYANTI NIP. 19631231 198903 2 048	Fungsional Umum		V	-	V	-	-	-	-	-	P	-	-	V	-	-	-	-	-
29	SYAFRUL, SY. SH NIP. 19690917 199003 1 003	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
30	PUJI ASTUTI, SE NIP. 19721220 201407 2 002	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	V	-	-	-	-	-
31	INGGRILA, S.Sos NIP. 19830401 200902 2 006	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	-	V	-	P	-	-	V	-	-	-	-	-
32	JAMURIS, S.Sos NIP. 19700820 200701 1 007	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	-	V	-	L	-	-	V	-	-	-	-	-
33	ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md NIP. 19710309 200212 1 003	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	V	-	-	L	-	V	-	-	-	-	-	-
34	BASRI HASANNUDIN NIP. 19851228 201001 1 008	Fungsional Umum		V	-	V	-	-	-	-	-	L	-	V	-	-	-	-	-	-
35	FENTRI DARMA YOGA NIP. 19840215 201001 1 017	Fungsional Umum		V	-	V	-	-	-	-	-	L	-	V	-	-	-	-	-	-
36	ZULHAMI, A.Md NIP. 19660614 200012 1 002	Fungsional Umum		V	-	-	-	-	V	-	-	L	-	V	-	-	-	-	-	-
37	RIYANDI NIP. 19700709 199703 1 005	Fungsional Umum		V	-	V	-	-	-	-	-	L	-	V	-	-	-	-	-	-
38	JUMRIANI NIP. 19840627 201407 2 004	Fungsional Umum		V	-	V	-	-	-	-	-	P	-	V	-	-	-	-	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>24</b>		<b>10</b>			<b>3</b>	<b>19</b>	<b>7</b>			<b>11</b>	<b>23</b>	<b>5</b>			<b>1</b>	<b>11</b>

Painan, Januari 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.SI  
NIP 19670712 199202 1 001

**FORM 1.**

**1. SKPD PELAKSANA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN :**

1. Pelayanan Dokumen Kependudukan
2. Pengembangan dan Pembangunan database Kependudukan melalui jaringan SIAK secara terpadu
3. Pelaksanaan KTP-el

**I. URUSAN JAWIB NON PELAYANAN DASAR**

**A. Jumlah program sebanyak 4 (empat) program dan kegiatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kegiatan**

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG					REALISASI					TINGKAT CAPAIAN (%)
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
<b>A.</b>	<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>158,800,000</b>	<b>312,490,550</b>	<b>10,375,000</b>	<b>-</b>	<b>481,665,550</b>	<b>157,200,000</b>	<b>299,202,970</b>	<b>10,374,500</b>	<b>-</b>	<b>466,777,470</b>	<b>96.91%</b>
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	79,800,000	-	-	79,800,000	-	69,571,103	-	-	69,571,103	87%
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	145,800,000	-	-	-	145,800,000	144,200,000	-	-	-	144,200,000	99%
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,000,000	5,426,200	-	-	18,426,200	13,000,000	5,387,900	-	-	18,387,900	100%
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	-	10,375,000	-	10,375,000	-	-	10,374,500	-	10,374,500	100%
10	Penyediaan alat tulis kantor	-	58,565,600	-	-	58,565,600	-	58,565,600	-	-	58,565,600	100%
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	14,249,400	-	-	14,249,400	-	14,232,000	-	-	14,232,000	100%
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	-	9,846,850	-	-	9,846,850	-	9,846,000	-	-	9,846,000	100%
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	8,900,000	-	-	8,900,000	-	8,820,000	-	-	8,820,000	99%
17	Penyediaan makanan dan minuman	-	19,800,000	-	-	19,800,000	-	19,464,450	-	-	19,464,450	98%
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	44,950,000	-	-	44,950,000	-	42,444,700	-	-	42,444,700	94%
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	70,952,500	-	-	70,952,500	-	70,871,217	-	-	70,871,217	100%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>-</b>	<b>40,419,000</b>	<b>21,800,000</b>	<b>464,116,444</b>	<b>526,335,444</b>	<b>-</b>	<b>36,807,300</b>	<b>21,786,000</b>	<b>459,026,444</b>	<b>517,619,744</b>	<b>98%</b>
09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	464,116,444	464,116,444	-	-	-	459,026,444	459,026,444	99%
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	247,000	10,000,000	-	10,247,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000	98%
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	40,172,000	11,800,000	-	51,972,000	-	36,807,300	11,786,000	-	48,593,300	93%

3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,178,400,000	2,777,255,756	36,550,000	32,500,000	4,024,705,756	1,176,600,000	#####	36,550,000	19,470,300	3,986,653,396	99%
01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	33,000,000	28,850,000	17,250,000		79,100,000	31,200,000	28,750,000	17,250,000		77,200,000	98%
03	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	18,000,000	26,300,000	-	-	44,300,000	18,000,000	26,000,000	-	-	44,000,000	99%
07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	7,200,000	54,097,500	7,000,000		68,297,500	7,200,000	48,671,971	7,000,000	-	62,871,971	92%
14	Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana pembangunan kependudukan		25,000,000			25,000,000		24,895,200	-	-	24,895,200	100%
15	Pelayanan Kartu Identitas Anak		46,650,000			46,650,000		46,237,000	-	-	46,237,000	99%
17	Penerbitan NIK nasional dan penerapan e-KTP	49,200,000	37,200,000			86,400,000	49,200,000	37,124,900	-	-	86,324,900	100%
22	Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)		73,600,000			73,600,000		73,552,700	-		73,552,700	100%
25	Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai	18,000,000	24,602,500			42,602,500	18,000,000	24,495,400	-		42,495,400	100%
27	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	30,000,000	27,275,000			57,275,000	30,000,000	26,374,600	-		56,374,600	98%
28	Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital	12,000,000	22,462,300			34,462,300	12,000,000	22,458,600	-	-	34,458,600	100%
31	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	11,400,000	1,465,001,000	12,300,000		1,488,701,000	11,400,000	1,463,577,904	12,300,000		1,487,277,904	100%
34	Pelayanan Administrasi Kependudukan disatker	908,400,000	811,518,500		32,500,000	1,752,418,500	908,400,000	797,747,171		19,470,300	1,725,617,471	98%
36	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	42,000,000	28,850,900			70,850,900	42,000,000	28,759,600			70,759,600	100%
38	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil		29,044,600			29,044,600		28,719,500			28,719,500	99%
39	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk		25,890,000			25,890,000		25,862,800			25,862,800	100%
41	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	37,200,000	27,626,456			64,826,456	37,200,000	27,569,350			64,769,350	100%
41	Peningkatan Pencatatan Kematian	12,000,000	23,287,000			35,287,000	12,000,000	23,236,400	-	-	35,236,400	100%

4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	57,095,000	-	-	57,095,000	-	57,042,900	-	-	57,042,900	99.91%
	21 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja		57,095,000			57,095,000		57,042,900			57,042,900	99.91%
<b>JUMLAH</b>		<b>1,337,200,000</b>	<b>3,187,260,306</b>	<b>68,725,000</b>	<b>496,616,444</b>	<b>5,089,801,750</b>	<b>1,333,800,000</b>	<b>3,147,086,266</b>	<b>68,710,500</b>	<b>478,496,744</b>	<b>5,028,093,510</b>	<b>98.79%</b>

- B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  
 C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah  
 D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan kurang mencukupi  
 E. Permasalahan dan Solusi :

**Permasalahan**

- Masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan
- Kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat masih rendah
- Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai sehingga masih menghambat proses pelayanan
- Kebijakan pusat yang dikeluarkan dianggap justru menyulitkan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan

**2. Solusi**

- Perlu dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai pertemuan dan media cetak serta elektronik
- Peningkatan kemampuan aparaturnya pelaksana kegiatan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis
- Pengadaan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
- Koordinasi secara rutin dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat tentang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat agar regulasi yang diterbitkan lebih mempermudah pelayanan bagi masyarakat

**F. Hal-hal yang perlu dilaporkan :**

- Perlu segera dilakukan penataan struktur kerja penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti yang diamanatkan Perda Kab. Pesisir Selatan No. 10 Tahun 2011
- Saat ini pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di kabupaten pesisir selatan sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat, agar pemanfaatan teknologi tersebut lebih maksimal, perlu perluasan
- Pelaksanaan program nasional penerapan e-KTP di kabupaten pesisir selatan secara umum dapat berjalan dengan baik dan usulan perpanjangan jadwal pelayanan di tahun 2013 telah disetujui oleh pemerintah pusat. Saat ini pelaksanaan pelayanan pembuatan e-KTP
- Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan sudah bisa dilakukan di Unit Kerja Layanan (UKL) di setiap Kecamatan



**LAMPIRAN III.3**  
**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN**  
**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
9	Kependudukan & Catatan Sipil	92	Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akte kelahiran	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran 171.461 orang	97.83%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah penduduk usia 0-18 tahun 175.258		
		93	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP e	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP 343.930 jiwa	96.43%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas 356.679		

Painan, Januari 2020

**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.SI**  
NIP 19670712 199202 1 001



## RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Fungsi Penunjang Lainnya)

- 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2 Pogram Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3 - Program perencanaan pembangunan daerah terletak di bagian sekretariat dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 2 orang yang terdiri dari kepala sub perencanaan, pelaporan keuangan dan bendahara pengeluaran dengan kualifikasi pendidikan S2 untuk kepala sub perencanaan, pelaporan keuangan dan SLTA untuk jabatan Bendahara Pengeluaran dan Golongan III/c untuk kepala sub bagian perencanaa, pelaporan keuangan dan golongan II/c untuk bendahara
- 4 Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD
- 5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6 Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kurang mencukupi
- 7 Permasalahan :
  - Saat ini printer yang ada di bagian perencana dan keuangan berjumlah 2 (dua) orang sementara yang dibutuhkan 4 (empat) buah
  - Belum adanya lemari arsip khusus untuk menyimpan arsip keuangan untuk 5 tahun laporan keuangan
  - Belum adanya mesin penghancur kertas
- Solusi Solusi :
  - Perlunya penambahan jumlah printer
  - Dengan adanya lemari arsip khusus keuangan sehingga dokumen mudah ditemukan dan tersimpan dengan baik
  - Dengan adanya mesin penghancur kertas laporan yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak lain.
- 8 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
  - untuk dapat tersusunnya laporan keuangan, Lakip, Sakip, Renstra dan lain-lain diharapkan setiap bidang dapat melaporkan laporan capaian kinerjanya setiap bulan

Painan, 29 Januari 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.SI  
NIP 19670712 199202 1 001

## KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

- A. SKPD Pelaksana :
- B. Forum Koordinasi :
- C. Materi Koordinasi :
- D. Instansi Vertikal yang Terlibat :
- E. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- F. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan :
- G. Hasil dan Manfaat Koordinasi :
- H. Tindaklanjut Hasil Koordinasi :
- I. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan :
- J. SDM Pendukung Program dan Kegiatan :
  - Jumlah Pegawai :
  - Kualifikasi Pendidikan :
  - Pangkat atau golongan :
  - Jumlah Pejabat Struktural :

**NIHIL**

Painan, Januari 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



*[Handwritten Signature]*  
EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.SI  
NIP 19670712 199202 1 001







## KERJASAMA SKPD DENGAN PIHAK KETIGA

SKPD Pelaksana: :

Tabel Program dan Kegiatan :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	Realisasi (Rp)				
<b>I.</b>	<b>Program .....</b>						
1	Kegiatan						
2	Dst						
<b>II.</b>	<b>Program</b>						
1	Kegiatan						
2	Dst						
	<b>Total</b>						

N I H I L

- A. Mitra yang diajak Kerjasama
- B. Dasar Hukum
- C. Bidang Kerjasama
- D. Nama Kegiatan
- E. Satuan kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
- F. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- G. Sumber dan jumlah anggaran
- H. Jangka waktu kerjasama
- I. Hasil (output) dari kerjasama
- J. Permasalahan dan Solusi
  - 1. Permasalahan
  - 2. Solusi



## TUGAS PEMBANTUAN

SKPD Pelaksana:

I. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Bidang

- A Dasar Hukum
- B Instansi Pemberi Tugas
- C SKPD Pelaksana
- D Program dan Kegiatan
- E Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- F Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
- G SDM Pendukung program dan kegiatan : (jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsioanl)
- H Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi, dsb)
- I Permasalahan dan Solusi
- J Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
- K tabel Program dan kegiatan

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP/CIKUP/MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	Realisasi (Rp)				
I.	Program .....						
1	Kegiatan						
2	Dst						
		N I H I L					
II.	Program						
1	Kegiatan						
2	Dst						
<b>Total</b>							

Painan, Januari 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESIR SELATAN



# DOKUMEN PENDUKUNG IKK.2

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

NO.	KELENGKAPAN	ADA	KET
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
	Fc Program Nasional		
	Fc Program RKPD		
	Fc SOP Teknis		
2	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan		
	Fc Perda Pelaksanaan Permen		
	Fc Permen yang memerintahkan		
3	Penataan Kelembagaan Daerah		
	Fc Struktur Jabatan		
	Fc Jabatan Fungsional		
4	Pengelolaan Kepegawaian Daerah		
	Fc DUK		
5	Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Fc Renstra (hal Cover, hal rekap, dan hal Pengesahan)		
	Fc Renja (hal Cover, Hal Rekap, Dan Hal Pengesahan)		
	Fc RKA (Hal Cover, Hal Rekap, Dan Hal Pengesahan)		
6	Pengelolaan Keuangan Daerah		
	Fc DPA (hal Cover, hal Rekap, Dan Pengesahan)		
	Fc LRA		
	Fc Neraca		
	Fc CALK		
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	Fc Laporan Aset		
	Fc BA Inventaris Rekon		
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Masyarakat		
	Foto Papan Pengumuman		
	Foto Pos Pengaduan		
	Foto Leaflet		
	Foto Mobil Keliling		
	Foto Media Massa		
	Fc Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		

Painan, Januari 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFALIZA YULIASMAN, SE. M.SI

**Lampiran III.1:  
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Peraturan tentang Kependudukan	4	Pengurusan KTP-el	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-el dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP 346.202 jiwa</li> <li>- Jumlah penduduk yang wajib berKTP 356.679 jiwa</li> </ul>	97%	
			5	Pengurusan KIA	Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA 36.432 jiwa</li> <li>- Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA 175.258 jiwa</li> </ul>	20.79%	
		(6)	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah Personil Satpol PP pada akhir tahun 2019 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak 47 orang</li> <li>- Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah = 511.725 orang</li> </ul>	0.01%		
2	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Kepegawaian	(20)	Ratio PNS terhadap Penduduk	Jumlah PNS Kabupaten dibagi Jumlah Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 sebanyak 6.789 orang</li> <li>- Jumlah Penduduk Kabupaten Tahun 2018 sebanyak 511.725 orang</li> </ul>	1.33%	<p>Jumlah PNS Kabupaten (Data BKD)</p> <p>Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester 2 tahun 2019</p>

Painan, Januari 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**Lampiran III.1:**  
**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KET
2	KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN PEMERINTAH SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain	Jumlah MOU/PKS yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU/PKS yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak 32 MOU/PKS yang terdiri dari: Nomor 1-29 PKS tentang pemanfaatan data kependudukan dengan OPD dilingkup Pemda Pes-Sel Nomor 30-32 tentang pelayanan dengan RSUD, BPJS dan Kemenag	32 MOU/PKS	
13	TEROBOSAN/INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Disdukcapil dalam tahun 2018	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Disdukcapil dalam tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak 2 buah yaitu " 1) Penghargaan Kategori Khusus atas Dukungan yang kuat oleh Bupati Pesisir Selatan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  2) Penghargaan Kategori "Dinas Dukcapil Maju" pada Penilaian Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota se-Provinsi Sumatera Barat terbaik dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan Tahun 2019	2 Penghargaan	Dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Barat

Painan, Januari 2020

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



**FORMAT DATA CAPAIAN MAKRO  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Urusan** : Wajib Non Pelayanan Dasar  
**OPD Pelaksana** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Urusan/Indikator	Satuan	Tahun		Ket
			2018	2019	
6	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
a	Rasio Penduduk berKTP Persatuan Penduduk	jiwa	0.9	0.94	
b	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	jiwa	0.94	0.96	
c	Kepemilikan KTP (%)	%	90.2	93.5	
d	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	jiwa	438.01	481,501	
e	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK				
	◆ NIK Pemuktahiran Data Penduduk	jiwa	508,693	511,725	
	◆ Penerbitan	jiwa	314,761	337,491	
	◆ Penerapan e_KTP	jiwa	seumur hidup	seumur hidup	
f	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	jiwa	90.2	95.2	

Painan, Januari 2020

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

  
**EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.SI**  
 NIP 19670712 199202 1 001

**FORMAT PENYUSUNAN LKPj  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan : **Wajib Non Pelayanan Dasar**  
OPD Pelaksana : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	Program/Kegiatan	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>481,665,550</b>	<b>466,777,470</b>	<b>96.91%</b>
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79,800,000	69,571,103	87.18%
	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	145,800,000	144,200,000	98.90%
	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,426,200	18,387,900	99.79%
	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10,375,000	10,374,500	100.00%
	10 Penyediaan alat tulis kantor	58,565,600	58,565,600	100.00%
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,249,400	14,232,000	99.88%
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	9,846,850	9,846,000	99.99%
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,900,000	8,820,000	99.10%
	17 Penyediaan makanan dan minuman	19,800,000	19,464,450	98.31%
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44,950,000	42,444,700	94.43%
	19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	70,952,500	70,871,217	99.89%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>526,335,444</b>	<b>517,619,744</b>	<b>98.34%</b>
	09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	464,116,444	459,026,444	98.90%
	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,247,000	10,000,000	97.59%
	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51,972,000	48,593,300	93.50%
<b>3</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>4,024,705,756</b>	<b>3,986,653,396</b>	<b>99.05%</b>
	01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	79,100,000	77,200,000	97.60%
	03 Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	44,300,000	44,000,000	99.32%
	07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	68,297,500	62,871,971	92.06%
	14 Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana pembangunan kependudukan	25,000,000	24,895,200	99.58%
	15 Pelayanan Kartu Identitas Anak	46,650,000	46,237,000	99.11%
	17 Penerbitan NIK nasional dan penerapan e-KTP	86,400,000	86,324,900	99.91%
	22 Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)	73,600,000	73,552,700	99.94%
	25 Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai	42,602,500	42,495,400	99.75%
	27 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	57,275,000	56,374,600	98.43%
	28 Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital	34,462,300	34,458,600	99.99%
	31 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	1,488,701,000	1,487,277,904	99.90%
	34 Pelayanan Administrasi Kependudukan disatker	1,752,418,500	1,725,617,471	98.47%
	36 Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	70,850,900	70,759,600	99.87%
	38 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	29,044,600	28,719,500	98.88%

	39	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	25,890,000	25,862,800	99.89%
	41	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	64,826,456	64,769,350	99.91%
	42	Peningkatan Pencatatan Kematian	35,287,000	35,236,400	99.86%
<b>4</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>57,095,000</b>	<b>57,042,900</b>	<b>99.91%</b>
	21	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	57,095,000	57,042,900	99.91%
	<b>JUMLAH</b>		<b>5,089,801,750</b>	<b>5,028,093,510</b>	<b>98.79%</b>

## B. REALISASI PELAKSANAAN RPOGRAM DAN KEGIATAN

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 481.665.550,00 dan terelisasi sebesar Rp. 466.777.470 atau sebesar 96.91 % yang terdiri dari :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 79.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.571.103,00 atau sebesar 87 % disebabkan karena Belanja tersebut berdasarkan tagihan perbulannya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 145.800.000.00 terealisasi sebesar Rp. 144.200.000.00 atau sebesar 99 % disebabkan karena ada honor Kuasa Penggunaan yang tidak bisa dibayarkan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.426.200 terelialisasi sebesar Rp. 18.387900 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.375.000 tereliasiasi sebesar Rp. 10.374.500 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terelialisasi sebesar 100 %
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 14.249.400 terelialisasi sebesar Rp. 14.232.000 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.846.850 terelialisasi sebesar Rp. 9.846.000 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.900.000 terelialisasi sebesar Rp. 8.820.000 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat mempunyai anggaran sebesar Rp. 19.800.000 sebesar Rp. 19.464.450 atau sebesar 98 %
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 44.950.000 terelialisasi sebesar Rp. 42.444.700 atau sebesar 94 % disebabkan adanya kelebihan BBM kendaraan yang tidak dapat dibelanjakan sementara belanja SPPD sudah habis
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah mempunyai anggaran sebesar Rp.70.952.500 terelialisasi sebesar Rp. 70.871.217 atau sebesar 99,99 %

### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur mempunyai anggaran sebesar Rp. 526.335.444 terelialisasi sebesar Rp. 517.619.744 atau sebesar 98 %

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 464.116.444 terelialisasi sebesar Rp. 459.026.444 atau sebesar 99,99 % disebabkan adanya selisih harga kontrak
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.247.000 terelialisasi sebesar Rp. 10.000.000 atau sebesar 98 % di sebabkan adanya belanja cetak yang tidak dibelanjakan.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkaa kendaraan dinas/operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 51.972.000 terelialisasi sebesar Rp. 48.593.300 atau sebesar 93 % karena adanya sisa belanja pajak kendaraan

### 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.024.705.756 terelialisasi sebesar Rp. 3.986.653.396 atau sebesar 99 %

- Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu mempunyai anggaran sebesar Rp. 79.100.000 terelialisasi sebesar Rp. 77.200.000 disebabkan adanya kelebihan belanja Kuasa Pengguna Anggaran dan belanja BBM yang tidak bisa dibelanjakan
- Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) mempunyai anggaran sebesar Rp. 44.300.000 terelialisasi sebesar Rp. 44.000.000 atau sebesar 99 % disebabkan adanya kelebihan belanja perjalanan dinas

- Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 68.297.500 terelialisasi sebesar Rp. 62.871.971 atau sebesar 92 % disebabkan karena adanya belanja bahan material even yang tidak jadi dilakukan
  - Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penyusunan rencana pembangunan kependudukan mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.000.000 terelialisasi sebesar Rp. 24.895.200 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak mempunyai anggaran sebesar Rp. 46.650.000 terelialisasi sebesar Rp. 46.237.000 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP mempunyai anggaran sebesar Rp. 86.400.000 terelialisasi sebesar Rp. 86.324.900 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) mempunyai anggaran sebesar Rp. 73.600.000 terelialisasi sebesar Rp. 73.552.700 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai mempunyai anggaran sebesar Rp. 42.602.500 terelialisasi sebesar Rp. 42.495.400 atau sebesar 99,99 %
  - Anggaran kegiatan Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital sebesar Rp. 34.462.300 terelialisasi sebesar Rp. 34.458.600 atau sebesar 99,99 %
  - Anggaran Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK Non Fisik) sebesar Rp. 1.488.701.000 terelialisasi sebesar Rp. 1.487.277.904 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Disatker mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.752.418.500 terelialisasi sebesar Rp. 1.725.617.471 atau sebesar 98 % disebabkan adanya belanja modal yang tidak dapat dibelanjakan
  - Kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.850.900 terelialisasi sebesar Rp. 70.759.600 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai anggaran sebesar Rp. 29.044.600 terelialisasi sebesar Rp. 28.719.500 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 25.890.000 terelialisasi sebesar Rp. 25.862.800 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran mempunyai anggaran sebesar Rp. 64.826.456 terelialisasi sebesar Rp. 64.769.350 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Peningkatan Pencatatan Kematian mempunyai anggaran sebesar Rp. 35.287.000 terelialisasi sebesar Rp. 35.236.400 atau sebesar 99,99 %
- 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai satu Kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 57.095.000 terelialisasi sebesar Rp. 57.042.900 atau sebesar 99,91 % disebabkan adanya kelebihan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam porpinsi dan belanja BBM Kendaraan**

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

- Kegiatan ini mengalami kendala dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti printer, scanner dan ribbon untuk pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak, sehingga saat ini pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak harus dilakukan secara bergantian dengan penerbitan KTP\_el.

### 2. Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Keliling (UP3SK)

- Kegiatan ini mengalami masalah terkait tidak tersedianya jaringan internet di beberapa titik layanan yang menyebabkan pelayanan tidak maksimal sehingga titik layanan harus digeser ke lokasi yang tersedia jaringan internetnya.

### 3. Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e\_KTP

- Kegiatan ini mengalami permasalahan untuk mencapai target kinerjanya yakni ketidaktersediaan blanko KTP\_el dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pengadaan Blangko KTP\_el hanya bisa dilakukan oleh oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Kab/Kota tidak mempunyai wewenang

### 4. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse

- Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :



- Sering terjadi perubahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Data Warehouse dan akses data
- Aplikasi sebagai media pemanfaatan data pada Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga Pengguna belum tersedia sehingga pemanfaatan data warehouse secara online tidak dapat dilaksanakan sehingga akses data kependudukan melalui data warehouse masih dilaksanakan secara manual.

#### **5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

- Kegiatan ini mengalami kendala pada pemilihan metode pelaksanaan pengukuran atau survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum menguasai metode pengukuran IKM secara menyeluruh.

#### **6. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan**

- Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :  
Lambatnya atau kurangnya update Data Konsolidasi Bersih (DKB) persemester dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga data yang digunakan masih data lama.

#### **7. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu**

- Minimnya kapasitas dan kemampuan SDM pengolahan data dan penyajian data kependudukan.
- Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :
- Sarana dan Prasarana pendukung masih minim untuk pemeliharaan peralatan pelayanan

#### **8. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker**

- Beberapa kendala dan permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :
- Sering terjadinya gangguan jaringan di beberapa Unit Kerja Layanan (UKL), sehingga menghambat pelayanan dan pencapaian target Coklit Data Penduduk.
- Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan teknis operator dan register di Unit Kerja Layanan tentang penggunaan Aplikasi SIAK.

Painan, Januari 2020

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.SI**  
NIP. 19670712 199202 1 001







